

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Manajemen

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Sutabri (2012:6) pada dasarnya “sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Atmosudirdjo (2012: 7) mendefinisikan bahwa sistem adalah sebagai berikut :

Suatu sistem yang terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen - komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Selanjutnya Menurut Mcleod (2004) dalam Yakub (2012:1) bahwa “sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa sistem adalah sekelompok unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama.

2.1.2 Pengertian Informasi

Menurut Mcleod dalam Yakub (2012:8) “informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”.

Menurut Sutabri (2012:22) “informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan”.

Selanjutnya Susanto (2007:46) mendefinisikan “informasi sebagai hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”.

Dari definisi-definisi di atas yang dimaksud dengan informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang.

2.1.3 Pengertian Manajemen

Menurut Nugroho (2007:58) “manajemen adalah suatu tim yang disusun oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut Bangun (2008:38) “manajemen adalah rangkaian aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuannya”.

Menurut Stoner (2006:60), pengertian manajemen adalah sebagai berikut :

Suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi di atas penulis berpendapat bahwa manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut Mcleod (2010:11) “sistem informasi manajemen (SIM) adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”.

Menurut Jogiyanto (2006:14) “sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen”.

Berdasarkan pada beberapa definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa sistem informasi manajemen memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan.

2.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Keuangan Daerah disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi

keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Program SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga *outputnya* dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

2.2.1 Tujuan dan Manfaat SIMDA

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-government*.
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin), dan
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 1. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku.
 2. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2.2.2 Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

2.2.3 Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), yaitu sebagai berikut :

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal, pelayanan publik, situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

2.3 Aplikasi SIMDA Keuangan

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah secara integrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

2.3.1 Perkembangan SIMDA Keuangan

1. SIMDA Versi 1.0

Aplikasi SIMDA versi 1.0 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draf sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai tahun 2004.

2. SIMDA Versi 2.0

Aplikasi SIMDA versi 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat dari adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 tahun 2005 mengenai SAP, dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai mengaplikasikan sejak tahun 2004 sampai tahun 2006.

3. SIMDA Versi 2.1

SIMDA Versi 2.1 merupakan sistem informasi versi terbaru yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri No. 3 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai saat ini masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2.3.2 Output yang Dihasilkan

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan (BPKP,2008) adalah :

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Penatausahaan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - d. Surat Tanda Setoran (STS)
 - e. Register
 - f. Surat pengendalian lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Jurnal
 - b. Buku Besar
 - c. Buku Pembantu
 - d. Laporan Realisasi Anggaran
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Neraca

Program Aplikasi SIMDA keuangan didukung dengan :

- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran
- b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan
- c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA keuangan.

2.3.3 Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan (BPKP,2008) adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan tepat waktu.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.
5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing (EDP)* audit.

2.3.4 Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah :

1. Output atau laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan

2. Berbasis windows
3. Validasi inputan data lebih terjamin
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi, dan
6. Memfasilitasi akuntansi penggunaan anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya :

1. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Kesiambungan *Maintenance*

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

3. *Transfer of Knowledge*

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya”.

4. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

2.3.5 Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan

Biaya yang dikenakan terhadap program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasinya,

biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasangkan program tersebut. Hal ini yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah biaya dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Itu berarti bahwa setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

2.3.6 Sumber Daya Manusia

Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai *counterpart*. BPKP menyediakan satu tim asistensi SIMDA yang terdiri dari penanggungjawab, pembantu penanggungjawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim. Sementara pihak pemerintah daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator database, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA harus memiliki prasyarat antara lain : mahir dalam menggunakan komputer, program database, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasisme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi.

Proses *transfer knowledge* dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe *counterpart*. Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih administrator database. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam inti *business process* program aplikasi SIMDA keuangan bagi administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya *troubleshooting*. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang

penggunaan SIMDA keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu : penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam proses implementasi SIMDA keuangan kaitannya dengan SDM dibutuhkan suatu komunikasi dan sikap yang baik karena dengan adanya komunikasi dan sikap yang baik maka penerapan SIMDA keuangan akan berjalan dengan baik pula sehingga pemerintah daerah bisa menciptakan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Komunikasi yang baik perlu dibina sebelum SIMDA keuangan diimplementasikan karena implementasi akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor yang mana implementor harus memiliki disposisi atau sikap yang baik sehingga sebuah kebijakan akan dapat berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan karena jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif.

2.3.7 Grand Theory

Grand theory adalah landasan teoritis yang merupakan panduan guna mendapatkan arahan yang tepat dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, sehingga dalam menelaah pustaka dan literatur yang ada akan mendapatkan teoritikal dasar dan empirik yang kuat untuk menyusun hipotesis dan pengembangan model penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Secara umum ada 2 grand theory yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Agency theory (teori agensi)
2. Signaling theory

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut SAP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

2.4.2 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 99 ayat 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

2.4.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAP No.1 Paragraf ke 9 tujuan laporan keuangan terdiri dari :

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 SAP menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber dan keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.4.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.4.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang memuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan dengan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan dengan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyelesaikan informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh orang yang berbeda maka hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
- c. Netralitas
Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun sedangkan perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta danya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat dilihat di tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Ridwan (2009)	Pengaruh penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada SKPD pemerintah Indramayu)	Dependen : Kualitas laporan keuangan Independen : Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan	Regresi linear sederhana	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2	Mohune (2013)	Pengaruh penerapan aplikasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo	Dependen : Kualitas laporan keuangan Independen : SIMDA keuangan	Regresi linear sederhana	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIMDA mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3	Tegela (2014)	Pengaruh penerapan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango	Dependen : Kualitas laporan keuangan Independen : SIMDA keuangan	Regresi linear sederhana	SIMDA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
4	Waskito (2014)	pengaruh penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Rembang	Dependen : Kualitas laporan keuangan Independen : Aplikasi Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)	Regresi linear sederhana	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMDA mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan

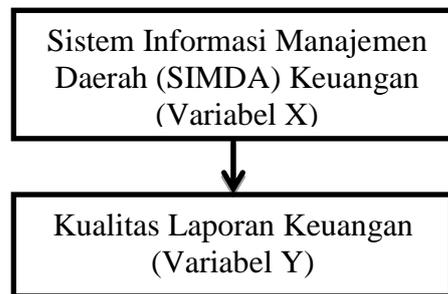
2.6 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan amanat PP No.56 tahun 2005 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka BPKP merancang SIMDA keuangan untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP mengenai kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada beberapa indikator laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi pemerintah yang baik yaitu meliputi keempat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan PP No.56 tahun 2005 dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yaitu SIMDA keuangan terhadap kualitas laporan keuangan mengandung arti yaitu sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja suatu organisasi khususnya pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013:104) :

- H_0 : Penerapan SIMDA keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD kota Palembang.
- H_a : Penerapan SIMDA keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD kota Palembang.